



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RDP DENGAN ESELON I KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	:	Kamis, 5 Februari 2015
Waktu	:	14:26:55 WIB – 17:10:11 WIB
Tempat	:	R. Rapat Komisi IX
Ketua Rapat	:	
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Set. Komisi IX
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 Para Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI
Hadir	:	44 Anggota

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :**

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Ermalena, MHS (F.PPP)

**F.PDIP :**

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP.,MM
8. Ir. Ketut Sustiwana
9. dr. Ribka Tjiptaning
10. Rieke Diah Pitaloka

11. Daniel Lumban Tobing
12. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
13. Nursuhud
14. dr. Karolin Margret Natasa

**F.PG :**

15. Hj. Saniatul Lativa, SE
16. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
17. H. Budi Supriyanto, SH, MH
18. dr. Charles J. Mesang
19. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
20. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

**F.P.GERINDRA :**

21. Khaidir
22. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
23. drg. Putih Sari
24. Roberth Rouw.

**F.PD :**

25. Drs. H. Zulfikar Achmad
26. Siti Mufattahah, Psi.
27. Drs. Ayub Khan.
28. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

**F.PAN :**

29. Ir. H.A. Riski Sadig
30. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
31. Hang Ali Syah Pahan, SH

**F.PKB :**

32. H. Marwan Dasopang
33. H. Handayani, SKM
34. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
35. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

**F.PKS :**

36. Ansory Siregar, Lc
37. Drs, H. Chairul Anwar, Apt
38. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM

**F.PPP :**

39. H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com
40. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

**F.P.NASDEM :**

41. Irma Suryani Chaniago, SE
42. Ir. Ali Mahir, MM
43. Amelia Anggraini

**F.P. HANURA :**

44. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

**ANGGOTA IZIN / SAKIT :**

—

**UNDANGAN :**

1. Eselon I Kementerian Tenaga Kerja

**JALANNYA RAPAT :**

<b>RAPAT DIBUKA PUKUL 14:26:55 WIB</b>
----------------------------------------

**KETUA RAPAT :**

Bisa dimulai pak Dirjen?

*Bismilahirrohmannirrohim,  
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

**Rekan-rekan anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos,  
Kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Informasi (Balitfo)**

Dan belum datang dari pembinaan pengawasan ketenagakerjaan belum ya?

Baik Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Pada siang hari ini kita masuk pada bagian kedua dari pertemuan atau rapat dengar pendapat antara komisi 9 dengan unit Eselon I Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tadi pagi komisi telah melakukan RDP dengan Sekretaris Jendral dan juga Inspektorat Jenderal sore ini kita berharap bisa dengan Dirjen PHI JSK Balitfo dan juga Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan data yang ada pada kami dan sesuai dengan penjelasan Menteri pada Raker yang lalu tiga mitra ini yang akan RDP pada siang hari ini tidak mengalami perubahan anggaran ya, tidak mengalami perubahan anggaran Dirjen PHI Jamsos mendapat anggaran 366 Milyar 966 juta kemudian, Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja 690 milyar 473 juta kemudian badan 76 Milyar ya, 76 Milyar 957 juta sesuai dengan kesimpulan Raker dengan menteri beberapa hari yang lalu pada hari ini kita akan melakukan pendalaman dan tentu saja diawali dengan penjelasan dari masing-masing kami awali dari Direktorat Jendral Pembinaan Industri kemudian dilanjutkan nanti dari Balitfo dan kemudian Dirjen Pembinaan Pengawasan kita jadwalkan dulu sampai dengan pukul Tujuh Belas ya mudah-mudahan pada pukul 17.00 materi sudah bisa kita selesaikan dan pendalaman bisa dicapai oleh masing-masing anggota.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, RDP kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum Untuk itu kami persilakan kepada Dirjen PHI dan Jamsos untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan program yang sudah dipaparkan pada Raker yang lalu lalu.

Kami silahkan

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN:**

Terima kasih bapak pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,*  
Salam dalam damai sejahtera kita.

**Yang kami hormati pimpinan komisi 9 dan anggota komisi 9 yang kami muliakan.**

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada siang hari ini kesempatan kepada kami diberikan dalam rangka melengkapi bagaimana rencana kita di tahun 2015 dengan dukungan program dan kegiatan di dalam pencapaian-pencapaian kita yang telah kita rencanakan bersama kiranya hubungan industrial bisa tercipta dengan harmonis dinamis dan berkeadilan.

Sebagaimana Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat mengetahui fenomena yang berkembang saat-saat ini kami Ditjen PHI dan Jamsos dengan berbagai arahan baik dari menteri juga memperhatikan situasi perkembangan-perkembangan yang terjadi tentu program-program dan kegiatan ini mempunyai beberapa referensi yang bapak dan ibu juga sudah mengetahuinya yang telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada waktu yang lalu, oleh karenanya bapak pimpinan menurut kami kami tidak lagi mengulang apa yang sampaikan oleh Pak menteri di dalam sasaran maupun fokus yang akan kita lakukan bersama di tahun 2015.

Kami menyampaikan secara singkat nanti sebagai melengkapi penjelasan untuk bisa mendapatkan persetujuan dari komisi 9 DPR RI dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang di muat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2015 ini Bapak pimpinan kami di sini juga lengkap bersamaan dengan seluruh eselon 2 di Direktorat Ditjen PHI dan Jamsos oleh karenanya kami menyampaikan pokok bahasan ada 3 besar yang pertama kami akan menyampaikan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Mengapa ini kami sampaikan, supaya bapak dan ibu bisa melihat dimana kekuatan-kekuatan dari struktur organisasi ini dalam melaksanakan, menciptakan maupun membuat suasana yang lebih kondusif.

Kemudian yang kedua kami juga beranjak menyusun program dan kegiatan ini dari referensi yaitu capaian-capaian yang sudah kita lakukan bersama di tahun 2014 baik dari kegiatan yang pusat maupun juga yang Dekon, Dekonsentrasi di 33 provinsi kemudian kami akan juga menyampaikan sebagai dukungan bagaimana rencana-rencana 2015 ini bisa kita capai tentu ada hal-hal yang kita lakukan bersama dalam rangka pelaksanaan program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja di tahun 2015. Slide.

**Bapak pimpinan, anggota yang kami hormati.**

Inilah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial saat ini ada 5 unit eselon 2 ini komposisi yang sekarang yang *existing* sekarang, yaitu ada Sekretariat Direktorat Jenderal kemudian Direktorat Persyaratan Kerja Kesejahteraan analisis Diskriminasi kemudian ada Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khusus yang kotak kedua ini, Bapak pimpinan dan anggota yang kami muliakan kita berencana seiring dengan perkembangan regulasi kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi maka kami mengusulkan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini menjadi 2 direktorat, artinya dipisah dia karena situasi perkembangan mengenai

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana kita ketahui sudah sepatasnya tidak lagi dikendalikan ataupun dikelola oleh satu direktorat tapi oleh 2 direktorat, untuk itu nanti juga mohon dukungan Kemudian Direktorat Kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial dan yang terakhir Direktorat Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Inilah 4 Direktorat teknis dan satu Unit penunjang di dalam mengelola program-program dan kegiatan Ditjen Hubungan Industrial dan jaminan social, lanjut.

Nah, ini rencana kami yang sudah kami usulkan Pak pimpinan nanti kami mohon dukungan nanti lanjut kami akan menyampaikan capaian program pengembangan hubungan industrial di tahun 2014 Ini ada 2 besar, bersyukur karena ada kemajuan Pak pimpinan, realisasi anggaran maupun persentase itu sekitar 86 persen di yang alokasi di Ditjen PHI dan jamsos yang terdiri dari pusat 84,38 persen dan dekosentrasi 89,21 persen ini juga menjadi perhatian yang di dekonsentrasi karena kita juga ingin persoalan-persoalan hubungan industrial dan jaminan sosial ini sebagaimana kita ketahui bersama akhir-akhir ini lebih banyak naik ke tingkat pusat atau ke Jakarta padahal menurut ketentuan mekanisme yang berlaku sedianya permasalahan hubungan industrial itu ditangani terlebih dahulu oleh Dinas Kabupaten kemudian Dinas Provinsi baru di tingkat Pusat.

Nah ini yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan persoalan-persoalan itu belum ditangani oleh Kabupaten dan provinsi teman-teman pekerja buruh maupun pengusaha sudah langsung minta kepada Menteri atau kepada Dirjen untuk difasilitasi atau diselesaikan ini gambaran realisasi anggaran pusat dan daerah Ditjen PHI dan Jamsos tahun anggaran 2014 lanjut Kami juga mempersiapkan bahan sebetulnya Pak pimpinan secara detail bagaimana realisasi atas pagu yang teralokasi di Dekon untuk 33 provinsi, ini ada rinciannya nanti kami buat ranking, menurut ranking pak pimpinan. Jadi ini Sulawesi Tengah ranking pertama. Sulawesi Utara ke-2, Maluku utara ketiga dan seterusnya sementara ranking yang terakhir yang ke-33, yaitu Kalimantan Timur ini serapannya kurang lebih 67 67 persen Inilah gambaran mengenai kondisi realisasi di dekonsentrasi 33 propinsi Yang Terhormat Bapak dan Ibu anggota komisi 9 DPR RI.

Selanjutnya kami menyampaikan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Tentu kami beranjak melaksanakannya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam renstra kita oleh karenanya ada indikator kinerja yang pertama yang bisa kita lihat sama-sama, kita simak di tahun 2014 kita menargetkan pengesahan pembuatan peraturan perusahaan di Indonesia itu target kita adalah 2000 naskah 2000 naskah peraturan perusahaan tapi puji syukur realisasi yang kita tercapai itu 254% Bapak pimpinan Ini realisasinya 5086 naskah peraturan perusahaan Inilah kinerja-kinerja yang kami sampaikan untuk bisa menjadi pertimbangan kepada kita bersama di dalam menggerakkan seluruh komponen-komponen *stakeholder* kita untuk bisa menuju hubungan industrial yang harmonis.

Sementara yang kedua sebagaimana sarana hubungan industrial yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada 8 sarana itu mengenai pendaftaran perjanjian kerja bersama antara Serikat Pekerja dan Pengusaha itu juga melebihi dari target yang telah kita tetapkan Ini sesuatu yang cukup baik menurut hemat kami seperti target PKB itu 250 naskah PKB yang hasil perundingan-perundingan bersama, nah kemudian realisasinya itu 260% atau 6 649 kesepakatan antara pengusaha dan dan pekerja Kemudian yang kita inginkan ke depan juga, baik PP maupun PKB ini bisa terus bertambah, selain bertambah juga ada perubahan kualitas maupun kuantitasnya nah ini seiring dengan jumlah serikat pekerja di tingkat perusahaan sekarang jumlah perusahaan di Indonesia kurang

lebih 200 Tujuh Belas ribu perusahaan, tentu dengan ada kualifikasi besar menengah dan kecil.

Nah kemudian juga ada yang sudah mempunyai Serikat Pekerja maupun yang belum kalau yang belum ada Serikat Pekerja itulah yang dinomor satu kita perlu menetapkan peraturan perusahaannya. Ini sebagaimana perintah Undang-Undang. Sementara di perusahaan yang sudah ada Serikat Pekerja itu harus dibuat perjanjian kerja bersama Inilah gambaran sampai sekarang jumlah Serikat Pekerja di tingkat perusahaan kurang lebih kurang lebih 12.000 di tingkat perusahaan. Nah, kalau ini sekarang jumlah PKB Jumlah bukan partai Pak, jumlah perjanjian kerja bersama bu Nur, 11 ribuan Pak pimpinan. Berarti masih ada target-target kita yang bisa kita kejar.

Nah dalam perjalanannya juga selalu terbentuk Serikat Pekerja yang baru Kemudian yang ketiga, indikator kinerja kita dan bisa diukur adalah jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja. Ini juga sebagaimana perintah dari Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 demikian juga atas konvensi ILO yang sudah kita ratifikasi tidak boleh adanya diskriminasi dalam bentuk apapun di perusahaan

Nah, ini kita juga sudah bisa melakukan pembinaan dan membentuk semacam satuan tugas-satuan tugas termasuk juga membuat ketentuan itu masuk dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, misalnya bapak Pimpinan, tidak boleh ada diskriminasi mengenai upah, tidak boleh ada diskriminasi mengenai pelatihan dan seterusnya dan seterusnya, ini tahun 2014 ini juga mencapai 100 persen lebih dari target yang berikut kita juga telah melakukan pembentukan-pembentukan lembaga kerja sama Bipartit di tingkat perusahaan Ini rencana kita di 2014, 400 lembaga dan syukur *Alhamdulillah* bisa terealisasi dibentuk 792 lembaga, artinya mendekati 200 persen apa yang menjadi tugas-tugas dan fungsi kita baik di jajaran pusat maupun propinsi/kab kota bisa memfasilitasi dibentuknya LKS Bipartit sebagai wadah musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan maupun gagasan dan ide apa yang menjadi kepentingan kebutuhan perusahaan bersama-sama dengan Serikat Pekerja maupun para pekerjanya kemudian yang kelima, indikator kinerja yang kelima, bapak dan Ibu adalah pembentukan lembaga kerjasama tripartit.

Nah ini tripartit kan plus pemerintah Ya ini memang target kita sebetulnya 52 lembaga, namun dalam realisasi di 2014 ada ketidakcapaian hanya mencapai 42 persen Ini menjadi bahan kita, pertimbangan kita supaya kami bisa lebih bagus lagi untuk menerapkan maupun membangun terbentuknya LKS tripartit di Kabupaten kota alasan yang klasik Pak pimpinan, ini tidak bisa mencapai target bukannya bukannya kemauan yang tidak ada tetapi nanti dalam operasional kalau LKS itu dibentuk tidak tersedianya anggaran untuk operasional sehari-hari. Nah itu yang menjadi alasan maka agak enggan Kabupaten kota membentuk LKS tripartitnya, namun dengan upaya Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu telah dikomunikasikan kepada Menteri Dalam Negeri, Dirjen Dalam Negeri sudah membuat Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri sudah membuat surat ke seluruh Gubernur untuk mendukung pembentukan LKS tripartit termasuk juga mendukung pembentukan dewan pengupahan termasuk juga untuk biaya operasional lembaga-lembaga tripartit yang ada di daerah-daerah Kemudian yang keenam indikator kinerja, Slide yaitu peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit ini juga mendekati 100 persen kemudian jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan tentang hubungan industrial ini juga melebihi target realisasinya kemudian bagaimana upaya kita penyelesaian terhadap *dispute* di luar pengadilan

hubungan industrial melalui mediasi ya ini juga melebihi target Kemudian jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta Jamsostek artinya yang yang formal maupun yang informal kita dorong terus untuk bisa menjadi anggota peserta di BPJS ini juga melebihi target yang terakhir indikator kinerja perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan atau penerapan struktur dan skala upah.

Nah ini juga menjadi program kita di tahun 2015 ini supaya perusahaan-perusahaan terus membentuk dan membuat struktur dan skala upah, contoh misalnya bulan Januari lalu Pak Menteri ada dengan kami Sidak ke salah satu perusahaan di daerah Jakarta Timur. Itu perusahaan besar ternyata masih belum membuat struktur dan skala upah. Nah ini langsung kita lakukan pembinaan dan pak Menteri sudah memerintahkan supaya segera dibuat struktur dan skala upah di perusahaan tersebut Ini juga mencapai atau pun melebihi melebihi target. Bapak dan Ibu yang kami hormati ini dari rangkaian beberapa indikator kinerja yang banyak sarat melebihi atau mencapai target namun tadi ada beberapa yang belum mencapai target tentu semua ada kekurangan kelemahan kami di dalam menyelenggarakan itu dan secara umum penyerapan anggaran tahun 2014 di Ditjen PHI dan Jamsos tadi mencapai kurang lebih 87 persen, tapi ada hambatan kendala antara lain yang pertama masih rendahnya penyerapan anggaran tahun 2014, artinya keinginan kita sebetulnya mendekati 100 persen ini disebabkan kegiatan baru dapat dimulai pada bulan April 2014 karena adanya revisi pemblokiran anggaran oleh kementerian keuangan kemudian yang kedua anggaran yang diserap periode Januari hingga April 2014 terbatas pada belanja operasional seperti gaji pegawai pemeliharaan serta langganan daya dan jasa yang ketiga adanya instruksi presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian kemudian yang keempat cukup tingginya frekuensi revisi anggaran yang kelima terdapat keterlambatan penetapan KPA di daerah.

Kemudian yang keenam ini juga karena adanya mutasi-mutasi yang cukup tinggi menurut hemat kami mempengaruhi kepada pengelola keuangan Ini kondisi umum yang bisa kami narasikan Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati sebagai tantangan kami kiranya di tahun 2015 dengan rencana alokasi anggaran nanti sebesar 366 M itu kami akan upayakan untuk bisa mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan Yang terakhir Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati inilah rencana capaian program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja tahun 2015.

Kiranya bapak dan Ibu anggota Dewan bisa nanti memberikan arahan maupun pandangan dan dukungan lebih konkrit lagi Yang pertama kegiatan pengelolaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial yang kami rencanakan sebesar 85 milyar sasarannya terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha. Tentu berbagai item indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakannya, tentu juga semua ada target-target yang menjadi pegangan bagi pengelola maupun para petugas maupun pegawai di lingkungan Ditjen PHI dan Jamsos sampai juga dengan di propinsi dan Kabupaten kota sementara kegiatan yang kedua adalah peningkatan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja yang direncanakan sebesar 65 milyar ini dengan berbagai sasaran bisa kami sampaikan di sini, yang pertama tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja kemudian yang kedua tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung Hukum yang ketiga tersusunnya kebijakan peraturan pengupahan yang adil simpel dan berkepastian.



Sebagai informasi Bapak dan Ibu yang kami hormati saat ini kami juga sedang *finishing* mengenai berbagai RPP ataupun berbagai program dari BPJS Ketenagakerjaan ada 4 ada 4 program moga-moga dalam waktu dekat 4 program ini bisa ditetapkan oleh Pemerintah menjadi peraturan pemerintah, yaitu program Jaminan Hari Tua program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian dan satu program yang baru yang kita sebut dengan program jaminan pensiun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 dan Undang-Undang Nomor 24 ini sedang kita bahas, walaupun sedikit dari berbagai kalangan serikat pekerja masih ingin pembulatan atas kontribusi iuran iuran pasti dan maupun juga nanti manfaat pasti di dalam program jaminan jaminan pensiun kemudian kegiatan besar yang ketiga yaitu konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan anggaran yang kami usulkan sebesar 51 milyar 308 juta 347 ribu rupiah.

### **Ibu dan Bapak yang kami hormati.**

Di 2015 juga karena banyaknya persoalan-persoalan di dalam hubungan industrial maka kami juga membuat suatu sasaran di 2015 ini dalam rangka pencegahan kemudian penyelesaian dan juga langkah tindak lanjut dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengusaha maupun pekerja buruh maka sasarannya adalah penerapan prinsip prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh karenanya bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun ini juga kita akan ada program bagaimana teman-teman kita para pekerja buruh itu faham ketika dia beracara di PHI, di pengadilan hubungan industrial jadi kemaren saya sempat juga ngobrol dengan Pak Ketua, Pak Dede bagaimana yaitu Pak, kami ada program di 2015 ini new programlah nanti teman-teman pekerja buruh kita fasilitasi memahami ketika dia beracara di PHI di pengadilan hubungan industrial, supaya sewaktu nanti proses pengadilan proses sidang di PHI itu semua pihak bisa lebih tahu lebih memahami apa yang harus dia persiapkan bagaimana dia menghadapi hakim dan sebagainya atau menghadapi pihak yang penggugat maupun yang tergugat.

Ini program nanti mohon dukungan Bapak dan Ibu supaya teman-teman kita pekerja buruh yang tujuan dari bagaimana penyelesaian hubungan industrial ini cepat murah dan tepat itu betul-betul bisa kita wujudkan Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu di tahun 2015 juga ada program yang menurut hemat kami program besar karena nanti di Januari 2016 itu akan berakhir 143 hakim *ad hoc* .

Di pengadilan hubungan industrial yang terdiri dari 2 komponen atau 2 unsur kurang lebih 70 itu nanti dari unsur pengusaha, kemudian kurang lebih tujuh puluhan juga dari unsur pekerja buruh. Nah ini akan berakhir mereka-mereka nanti akan melakukan tugas-tugas di pengadilan sebagai hakim *ad hoc* itu akan berakhir 143 orang maka tahun ini juga mohon dukungan nanti kami akan melakukan seleksi Hakim *AD hoc* kita akan melakukan penjaringan-penjaringan dari seluruh Indonesia dari 33 provinsi yang ada. Tentu harapan kita hakim-hakim nanti adalah Hakim yang betul-betul memberikan keputusan yang seadil adilnya kepada semua pihak Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan yang berikut adalah pengelolaan persyaratan kerja kesejahteraan dan analisis diskriminasi ini dengan indikator dan sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja buruh melalui penerapan syarat kerja non diskriminasi.

Nah ini tugas-tugas kita sebagaimana fungsi-fungsinya pembinaan kemudian juga melaksanakan kebijakan kemudian merumuskan dan melakukan bimbingan-

bimbingan kepada pihak-pihak termasuk tadi akan memfasilitasi pengesahan pembuatan peraturan perusahaan juga pembuatan perjanjian kerja bersama serta juga bimbingan di dalam pelaksanaan *outsourcing* termasuk bagaimana kita menciptakan kesetaraan di tingkat perusahaan oleh karenanya Bapak dan Ibu yang kami hormati, pengelolaan persyaratan kerja kesejahteraan dan analisis diskriminasi ini rencananya alokasi yang kami inginkan sebesar 41 milyar 416 juta 994 ribu Tentu dari pengalaman kami di 2014 hampir seluruh kegiatan itu mencapai target dan ada yang melebihi target Kemudian yang terakhir kegiatan, yaitu dalam rangka dukungan management dan dukungan teknis lainnya di Ditjen PHI dan Jamsos ini seperti gaji 13, kemudian remunerasi kemudian juga biaya dalam rangka hubungan internasional kemudian rapat koordinasi pusat dan daerah karena sebagaimana diketahui kita setiap tahun ada konferensi perburuhan Internasional di Jenewa.

Nah, tugas kamilah yang menyiapkan bagaimana sidang itu sebagai delegasi Republik Indonesia kita bisa membuat bahan kemudian juga bisa menginformasikan dan pembahasan-pembahasan baik Indonesia maupun selama berlangsung konferensi di Jenewa ini kita rencanakan sebesar 122 milyar, termasuk juga rencana penyusunan kajian dan sampai nanti kepada pokok-pokok pikiran dalam rangka kita melakukan perubahan-perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehubungan dengan sudah ada 15 judicial review yang ke Mahkamah Konstitusi sehingga patut kita bersama-sama nanti Bapak dan Ibu perlu kami informasikan sejenak disini sudah ada 15 Yudisial review ke Mahkamah Konstitusi dengan satu Ketetapan 12 putusan dan 2 permohonan dalam proses dimana 12 putusan yang kami infokan ini sudah ada keputusan, dengan keputusan sebagai berikut, 8 keputusan dikabulkan dan 4 putusan ditolak, ini dengan berbagai Pasal ada kurang lebih 15 tadi, mengenai kesalahan berat, mengenai upah proses mengenai komposisi SPSB kemudian mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai outsourcing, mengenai PHK mengenai hak-hak pekerja buruh jika di PHK dan pembayaran upah.

Kemudian mengenai kadaluarsa tuntutan juga mengenai upah sebagai hak Kemudian juga ada berbagai lagi yang terkait dengan upah minimum kebutuhan hidup layak dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir ini mengenai bagaimana pekerja yang mengundurkan diri dengan secara baik-baik. Nah sejalan dengan itu kami berfikir dimana tadi faktor yang pertama itu adalah juga keinginan masyarakat baik masyarakat pengusaha dan pekerja buruh. Faktor yang kedua tadi adalah dengan adanya 15 yudicial review Ketiga juga dengan situasi perkembangan saat ini maupun ke depan maka patut sudah kita sama-sama memikirkan untuk melakukan kajian dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga kami merencanakan tahun ini kita melakukan berbagai rangkaian-rangkaian FGD Focus Group Discussion, kemudian kajian-kajian dan nanti mengeluarkan pokok-pokok pikiran dan kita harapkan tahun depan sudah bisa tersusun NA nya, naskah akademisnya dan harapan kami di 2017 sudah bisa kita bahas di DPR Itu antara lain di dukungan management dan dukungan teknis yang sebesar 122 milyar termasuk juga Bapak dan Ibu yang kami hormati, berbagai persoalan yang kita hadapi bersama terkait dengan bagaimana eksistensi serikat pekerja/serikat buruh, baik yang di tingkat perusahaan, di luar perusahaan yang disebut dengan federasi maupun konfederasi nampaknya kita juga perlu bersama-sama melihat kembali ya Undang-Undang yang mengatur ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Ini hasil kajian maupun sementara maupun masukan-masukan dari berbagai pihak perlu kita lakukan duduk

bersama untuk memikirkan menyesuaikan Undang-Undang ini untuk bisa mengakomodir kepentingan di masa yang akan datang.

Contoh misalnya yang sederhana Undang-Undang ini mengatur dapat membentuk Serikat Pekerja di tingkat perusahaan 10 orang Nah, logikanya kalau di perusahaan ada 2000 orang pekerja berarti bisa tercipta atau terbentuk di situ 200 Serikat Pekerja. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita seorang pengusaha kalau 200 SP setahun itu 12 bulan berarti ini satu bulannya kurang lebih mengurus 20 SP berarti ini kan? Sudah habislah waktu kita sementara kita perlu operasional, bagaimana kinerja dan seterusnya dalam rangka itu bapak dan Ibu, kami juga berfikir kita perlu menelaah mengenai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 seperti ibu Irma paham betul mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh misalnya. Bukannya kita memperkecil ataupun mengurangi hak-hak dari berserikat bukan, tapi kita coba membuat keharmonisan Serikat Pekerja itu justru menjadi mitra yang kuat di dalam perusahaan di dalam rangka membangun kinerja-kinerja ke depan maka perlu kita lakukan juga telaahan terhadap Undang-Undang ini yang sudah kami alokasikan di dalam dukungan management di 122 Milyar.

Ini Bapak dan Ibu yang kami hormati secara garis besar dengan tadi ada 6 kegiatan, 5 kegiatan kalau bisa kami buat ke dalam suatu pengalokasian anggaran di tahun 2015 menurut unit kerja yang ada dan juga kepada dekonsentrasi sebagai berikut Ini Setditjen ataupun kelompok pusat kelompok pusat itu sekitar 247 oh bukan ini, bukan-bukan yang ini pak Aswan! Oh ya ini, ini ya betul Pak pusat itu 247 milyar jika dibandingkan dengan tahun 2014 ada kenaikan 38 persen yang terdiri dari Setditjen 95 milyar kemudian Dit PKKAD 31 kemudian KPHI 36 Milyar, Dit PJS 41 milyar Dit P3HI 42 milyar dan Dekonsentrasi sebesar 118 milyar. Jadi kurang lebih. Demikian, posisi-posisi pengalokasian anggarannya.

Kami juga sudah menyiapkan sebetulnya perincian menurut alokasi anggaran di dekonsentrasi yang 33 provinsi itulah Ibu dan Bapak terlebih lagi Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan sidang di Rapat Dengar Pendapat dengan kami Ditjen PHI dan Jamsos mengenai program dan kegiatan tahun 2015 Semoga penjelasan kami ini bisa melengkapi dan menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu untuk memperkuat dukungan kepada pelaksanaan di 2015, harapan kami Bapak dan Ibu bisa tentu menyetujui semua ini untuk bisa kami laksanakan Di awal tahun 2015.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepala Badan Penelitian.

**KEPALA BADAN PENELITIAN:**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore Bapak pimpinan komisi 9 yang kami muliakan.  
Beserta Ibu pimpinan Anggota Komisi 9 yang terhormat.**

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas diberikannya waktu untuk memaparkan tentang kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rapat Dengar Pendapat dengan komisi 9 DPR RI pada hari ini ini adalah merupakan kelanjutan dari Rapat Kerja dengan Bapak Menteri Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu dan kami mencoba untuk sedikit lebih menguraikan tentang kegiatan yang masuk dalam program di lingkungan Badan Penelitian dan Informasi.

Badan Penelitian dan Informasi ini adalah terminologi nama lama ketika namanya masih Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tapi ke depan kita akan berubah menjadi Barenbang Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian ketenagakerjaan Oleh karena itu pada kesempatan ini, mohon izin Bapak pimpinan dan anggota Dewan Yang Terhormat bahwa kami akan fokus yang ke depan.

Jadi lebih membicarakan tentang Badan Perencanaan dan Pengembangan lanjut Pokok bahasannya adalah yang pertama pendahuluan kami ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimana tugas dan fungsi dari Barenbang Kemudian yang kedua adalah realisasi anggaran tahun 2014 yang merupakan realisasi anggaran dengan nama masih badan penelitian dan informasi Kemudian alokasi anggaran tahun 2015 yang sepenuhnya adalah alokasi anggaran untuk Barenbang kemudian bagaimana rencana capaian program dan kegiatan tahun 2015 secara lebih terurai lagi, serta penutup lanjut Barenbang ini terdiri dari Sekretariat Barenbang disini juga sudah hadir kemudian pusat perencanaan ketenagakerjaan pusat perencanaan ketenagakerjaan ini adalah organisasi yang sebelumnya di sekretariat jendral kemudian yang berikutnya adalah pusat data dan informasi ketenagakerjaan dimana ini dari Balitfo sudah ada pada waktu Balitfo kemudian pusat penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan juga ada sejak Balitfo kemudian yang berikutnya adalah pusat pengembangan sistim informatika.

Ini adalah organisasi baru setingkat eselon II yang melengkapi Barenbang, dimana sebelumnya adalah setingkat eselon 3 dan ini diperlukan peningkatan karena salah satu persyaratan dalam rangka *e-goverment* adalah bahwa minimal yang menangani terkait dengan sistim informatika itu ada selevel eselon 2 Oleh karena itu masuk di wilayah ini tugas dan fungsi saya kira lewat saja lalu yang berikutnya adalah Proses bisnis Barenbang ini sebenarnya satu sama lain itu sangat terkait dimana titik sentralnya adalah disini kami coba menggambarkan bagaimana tentang dukungan management internal yang berada di bawah sekretariat Balitfo dan juga dukungan eksternal, Manajemen eksternal yang berada di Sekretariat Balitfo. Internal tentu saja berkaitan dengan lingkup unit eselon 2 di lingkungan Barenbang, dimana masing-masing punya kegiatan Puslitbang untuk melakukan penelitian dan pengembangan Pusdatin untuk melakukan penyusunan data dan informasi pusat PTK untuk menyusun rencana tenaga kerja makro dan menggerakkan penyusunan rencana tenaga kerja sektoral oleh kementerian dan lembaga serta rencana tenaga kerja mikro yang harus disusun oleh perusahaan.

Ini merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dimana tertera di dalam Pasal 7 terkait dengan perencanaan tenaga kerja Kemarin ketika Pak Menteri menyampaikan NAWAKERJA dan NAWAKERJA pertama yang disampaikan oleh beliau pada waktu hari Selasa yang lalu adalah penguatan

perencanaan tenaga kerja nasional Jadi Barenbang itu ujung pangkalnya adalah bagaimana nanti tenaga kerja itu terencanakan baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi/ Kabupaten kota serta di tingkat sektoral dan yang tentunya yang paling baik dan menjadi tujuan kita itu adalah semakin banyaknya di tingkat mikro yang dilakukan oleh perusahaan apabila perencanaan tenaga kerja ini bisa kita susun dengan baik maka tentu saja nanti ada keseimbangan antara persediaan tenaga kerja di Indonesia sampai ke daerah-daerah maupun keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja Kalau ini kita bisa menemukan 2 kegiatan ini menjadi seimbang maka kita akan bisa menjamin ketersediaan pasar kerja yang harmonis, pasar kerja yang baik.

**Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.**

Indikator IPK, IPK Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan sesungguhnya ada 9 dimana terdiri dari yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja ini yang kita ukur yang pertama. Kemudian yang kedua penduduk dan tenaga kerja yang ketiga adalah kesempatan kerja, yang keempat pelatihan dan kompetensi kerja, yang kelima produktivitas tenaga kerja, yang keenam hubungan industrial seperti yang tadi dijelaskan oleh Dirjen Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian yang ketujuh kondisi lingkungan kerja, yang ke-8 pengupahan dan kesejahteraan kerja kemudian yang kesembilan adalah jaminan jaminan sosial tenaga kerja Ini banyak, kalau menurut saya, panjang lebar seperti ini sudah ada disini dan juga menteri juga sudah pernah menyinggung.

Saya kira langsung *to the point* aja Gini-gini apa namanya, sebenarnya sama juga dengan yang tadi, saya lihat panjang lebar banget itu yang langsung *to the point* aja, pembahasan kita sekarang mengenai anggaran APBN P itu.

Terima kasih pimpinan.

.....:

Terima kasih Bapak pimpinan.

**Pimpinan yang terhormat dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Saya langsung saja kepada gambaran realisasi anggaran tahun 2014 Realisasi tahun 2014 Badan Litbang dan Informasi. Ini masih menggunakan terminologi Balitfo, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana kita dapat menyerap 92,9 persen dan fisik 100 persen Di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balitfo menduduki realisasi terbaik kedua di lingkungan Kementerian Nakertrans.

Kemudian yang berikutnya Perencanaan tenaga kerja yang pada waktu ada di Setjen ini juga bisa merealisasikan khusus di unit eselon 2 ini ada 92,07 persen dan juga fisik 100 persen lanjut Oleh karena itu secara capaian secara keseluruhan adalah fisik 100 persen dan keuangan 92,9 persen tidak tercapainya keuangan sampai 100 persen itu antara lain adalah karena adanya kebijakan-kebijakan misalnya dengan surat edaran Menteri PAN tentang peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja aparatur, kemudian juga intinya adalah dilarangnya atau pembatasan adanya kegiatan pertemuan rapat di luar kantor serta beberapa efisiensi terkait kontraktual.

**Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Ijinkan kami meneruskan langsung kepada anggaran 2015 dimana total anggaran kementerian tenaga kerja itu sebesar 4,2 Trilyun di antaranya adalah akan mendukung pagu Barenbang di Kementerian tenaga kerja sebanyak 76 Milyar 957 Juta 476 ribu rupiah atau sekitar 1,81 persen rinciannya adalah lanjut ini asal muasalnya tadinya Balitfo sebesar 98 milyar 782 juta 485 ribu kemudian karena ada pembentukan Kementrian Desa dan seterusnya, maka ada di bidang Trans 32 milyar 32,6 milyar, lalu yang bidang Naker tertinggal 66,312 milyar Lalu dengan adanya perpindahan unit perencanaan tenaga kerja yang memiliki anggaran 10 milyar maka ditambah lagi ada pusat pengembangan sistim yang belum ada anggarannya sebanyak nol, sehingga total Barenbang itu adalah 76 milyar 957 juta 476 ribu rupiah Nah, oleh karena itu kami memerlukan dukungan Anggota Dewan yang terhormat dalam rangka nanti APBNP perubahan itu adalah untuk mengisi kegiatan dan anggaran untuk pusat pengembangan sistim informasi ini yang uangnya berasal dari efisiensi dan penataan alokasi anggaran, sehingga .... lanjut komposisinya adalah demikian yang pertama adalah Sekretariat Barenbang sebesar 34,1 milyar Kemudian pusat perencanaan ketenagakerjaan 8,1 Milyar, pusat data dan informasi 5,1 Milyar, pusat penelitian dan pengembangan 6,4 Milyar dan pusat pengembangan sistem informatika 22,9 Milyar, dengan jumlah yang tidak berubah sebesar 76 Milyar 957 Juta 476 ribu rupiah.

Lalu secara singkat kami ingin menyampaikan rencana capaian program dan kegiatan tahun 2015 dimana program perencanaan penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan itu didukung oleh anggaran sebesar 79 milyar eh, 76 Milyar 950 juta 476 ribu , yang pada intinya adalah itu untuk mendukung 5 unit eselon 2 di lingkungan Barenbang dimana terkait dengan dukungan manajemen dan tugas lainnya itu terdiri sebanyak 7 output kemudian penyusunan perencana tenaga kerja sebanyak 4 output lalu pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebanyak 4 output serta penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan sebanyak 4 output dan pengembangan sistim informatika targetnya 3 output lanjut sebagai kesimpulan adalah bahwa alokasi anggaran Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 sebesar 76 milyar 957 juta 476 ribu yang dialokasikan pada 5 unit satuan kerja eselon 2 yang meliputi 5 kegiatan 5 kegiatan dalam format ketenagakerjaan.

Kemudian yang kedua kami mohon persetujuan komisi IX DPR yang terhormat terhadap APBNP ini khususnya dalam rangka menata ulang alokasi anggaran yang mengikuti adanya perubahan organisasi baru.

Saya kira demikian paparan kami kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepala badan Barenbang selanjutnya yang terakhir pada *session* ini. Kami persilahkan kepada Dirjen PPK Selamat datang pak.

**DIRJEN PPK:**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Mungkin paparannya belum siap, mohon maaf Pertama bahwa kami bekerja di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ini berdasarkan mengacu kepada obyek pengawasan yang ada serta beberapa kendala yang kita miliki bahwa saat ini yang tercatat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan perusahaan yang terdaftar itu ada 271.791 perusahaan kemungkinan ini tidak termasuk yang kategori sektor yang disebut informal dari jumlah ini sekitar 70 persen sendiri masuk dalam kategori perusahaan kecil dimana jumlah tenaga kerjanya 50 kebawah Tentu acuan ini harus diimbangi dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang saat ini ada di kita 2.000 97 orang Sementara menurut roadmap yang tak ada sesuai dengan kapasitas kerja pengawas, setiap pengawas mampu menyelesaikan tugas-tugas pemeriksaan 5 kali sebulan atau 60 kali setahun maka kalau kita perhitungkan kapasitas dengan orang masih kekurangan sebanyak 240 2.483 Inilah yang akan kita kejar sampai dengan akhir tahun 2000 19. Namun demikian untuk menjangkau seluruh objek ini tentunya selain menambah pengawas ketenagakerjaan juga nanti kita lakukan berbagai upaya mengefisienkan sistem penyelenggaraan pengawas ketenagakerjaan antara lain lanjut bahwa pengawas ketenagakerjaan saat ini memang tidak mampu menjangkau seluruh objek dengan alasan kekurangan pegawai pengawas Ketika otonomi atau urusan pengawas ini berada di Kabupaten kota bagi Kabupaten kota khususnya pemekaran yang benar-benar tidak memerlukan adanya kegiatan pengawas otomatis wajib menyelenggarakan urusan ketenagakerjaannya di dalamnya pengawasan inilah yang sering di lontarkan bahwa masih ada sekitar 108 Kabupaten kota yang tidak memiliki pengawas, padahal kalau sistim pengawasan lebih bisa diefisiensikan itu sebetulnya tidak relevan untuk menjadi reasoning kekurangan pengawas.

Oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Tahun 23 Tahun 2014 pengawasan akan diselenggarakan di propinsi Kabupaten kota sub urusan pengawasan ketenagakerjaan artinya bahwa provinsi lah nanti yang akan mengatur penyelenggaraan pengawas dimana diperlukan pengawas atau tidak sehingga bagi Kabupaten Kota yang kelebihan pengawas bisa di arahkan kepada pengawas daerah-daerah yang membutuhkan pengawas sesuai dengan spesifikasi daripada industri yang ada Ini akan lebih efisien ketika dibanding dengan penyelenggaraan pengawasan yang oleh Kabupaten kota yang merupakan urusan wajib dari setiap Kabupaten kota dan pengelolaan dan penetapan pengawas nanti berada di pusat dalam artian bahwa pengelolaan ini terbatas kepada pelatihan penunjukan penghitungan kebutuhan pengawas, pembinaan teknis peningkatan profesionalisme dan membimbing jenjang karir sesuai dengan jabatan fungsional Menteri Tenaga Kerja selaku pemegang mandat dari pada pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 nanti akan mendelegasikan kepemilikan petugas pengawas ini pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Ini sebagai pengantar.

Kemudian pencapaian program di tahun 2014 dan pengawasan ketenagakerjaan ini bisa dibilang memiliki 3 kegiatan yang generik ini hampir di seluruh dunia demikian kalau namanya Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat penerapan norma kerja dari pemeriksaan pengujian atas dasar perencanaan kebutuhan sosial ekonomi di daerah itu sampai kepada penyidikan.

Yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat penyebarluasan norma dalam artian membimbing pelaku-pelaku usaha atau pihak pengawasan agar mampu melaksanakan berbagai peraturan di bidang Ketenagakerjaan Yang ketiga adalah kegiatan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan khususnya di dalam pelibatan stakeholder utama maupun pihak-pihak lain yang mampu berperan di dalam mengawasi atau membantu pihak-pihak untuk dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dengan efektif dan efisien Dalam kerangka 3 kegiatan generik itu di 2014, yang kemudian nanti akan bergulir di tahun 2015 ada 3 karakteristik kegiatan yang kita laksanakan.

Pertama, adalah kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung antara lain penarikan pekerjaan anak 15 ribu ini yang terintegrasi dalam program PKH yang di kordinasi P2 TNP2K di bawah Wakil Presiden yang penarikannya dapat berhasil 100 persen dan tingkat melanjutkan ke pendidikan 98,2 persen masuk baik ke pendidikan formal maupun ke pendidikan nonformal berupa paket A, B maupun C selebihnya adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh i program Naker karena memang sudah Inline dengan kemampuan atau minat anak untuk sekolah Kegiatan ke-2 yang menyentuh langsung masyarakat adalah membantu UMKM untuk menerapkan cara-cara bekerja sehat dan selamat produktif dengan hasil *product* yang layak dikonsumsi oleh masyarakat Ibu/Bapak sekalian untuk bidang keselamatan dan kesehatan kerja ini kita masih menghadapi kendala kultural di mana kalangan industri menganggap bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja itu masih *cost* bukan investasi di dalam kerangka perlindungan Ummat manusia agar terhindar dari sebuah musibah kecelakaan kerja Ini persoalan pokok.

Oleh karena itu melihat komposisi pelaku ekonomi 70% ada di informal *economy cativity* maka kita melakukan strategi bagi perusahaan-perusahaan besar kita tinggal awasi peraturan di bidang keselamatan kerja namun bagi perusahaan-perusahaan kecil yang memang tidak mampu dan menghidupi menopang kehidupan ekonomi nasional kita berikan bimbingan dengan kegiatan-kegiatan dari APBN ini misalnya dengan cara pemakaian gas tabung gas dan cara-cara kebersihan higienis daripada memproduksi suatu barang khususnya makanan ini sasaran kita Yang ketiga adalah melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dimana Kementerian tenaga kerja untuk peningkatan sosial ekonomi para nelayan diberikan tugas pertama melakukan pelatihan dan kedua memberikan bimbingan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pada tahun 2014 kita memberikan cara-cara apa nelayan untuk selamat di dalam menjalankan pekerjaannya dengan pemakaian *savety savety checked*.

Kemudian cara-cara membaca cuaca secara kasar dan kemudian nanti di tahun 2015 akan kita tingkatkan menjadi sebuah pusat informasi keselamatan kerja bagi nelayan di bawah kita akan lakukan dengan ke Kementerian UKM Kegiatan yang kedua, jenis kegiatan yang kedua adalah peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan yaitu melakukan penambahan pengawas berupa pelatihan di tahun 2014 ini dialokasikan anggaran sepuluh kali angkatan yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ini hanya 2 angkatan, 3 angkatan tetapi karena berbagai



dukungan dari anggota dewan kemudian kebijakan untuk menambah pengawas kita lakukan 10 kali angkatan namun perlu kami laporkan Ibu/Bapak sekalian bahwa dari alokasi 10 angkatan masing-masing 30 orang jadi 300 APBN ini hanya dapat menjangkau peserta sebanyak 9 kali angkatan ini cukup mengherankan bagi kita ketika kita minta calon-calon pengawas dari Kabupaten kota maupun Provinsi kita mengalami kesulitan kandidat.

Kemudian pada tahun ini juga melalui kerjasama dengan provinsi Jawa Timur kita bisa menyelenggarakan pengawas satu kali angkatan dengan biaya dari APBD provinsi Jawa Timur Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan dengan cara melakukan bimbingan teknis bimbingan teknis bagi pengawas ketenagakerjaan untuk lebih mampu menerapkan bimbingan penerapan pasal-pasal utamanya bagi peraturan-peraturan baru atau kebijakan-kebijakan baru yang terbit sehingga ini sebagai upaya updating bagi pengawasan ketenagakerjaan. Kegiatan yang ketiga di tahun 2014 adalah penguatan operasional bahwa sesuai dengan konvensi dan Undang-Undang negara wajib menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan yang sangat spesifik disebutkan menanggung seluruh biaya yang diperlukan di dalam kerangka melakukan pemeriksaan, sebagai contoh adalah transportasi. Saya kesulitan mengikuti ini, mana yang dimaksud itu? Tidak yang kegiatan ini pak, yang masih satu yang di 2014. Nggak, musti jadi kita mengikuti agak susah ini halaman berapa, apanya. Saya masih di halaman 3 mas. Asrot ditayangkan, sudah yang lain. Jadi kita sulit. Terima kasih lanjut 2014.

Nah, 2014 yang matrik itu lho, halaman 3 slide 3. Saya masih berbicara disitu kemudian saya lanjut ke kendala di slide 7. Selama tahun 2014 kita mengalami kendala yaitu kegiatan efektif dapat dilaksanakan pada bulan April 2014, karena terlambat pencairan blokir dan revisi DIPA. Yang kedua, anggaran yang diserap periode Januari April 2014 terbatas pada belanja operasional pegawai yang ketiga adanya penghematan anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2014 dan amanat surat Menteri Keuangan Nomor: S.347/MK 0 2/2015 hal perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN tahun 2014 pemotongan anggaran DIPA revisi 2 ditandatangani 21 Juli 2014 sehingga ada sekitar 45 milyar yang tidak dapat kita laksanakan karena keterbatasan waktu sehingga capaian kami di tahun 2014 itu sekitar 71 persen. Yang keempat adalah adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pertemuan rapat di luar kantor sesuai Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 11 tahun 2014 yang muncul diakhir-akhir tahun 2014.

Kemudian adanya sisa anggaran tunjangan kinerja tetapi efisiensi atau sisa kontrak lanjut Tahun 2014, izin mohon kalau bisa kami lewati sesuai dengan tadi sudah kami uraikan saya langsung di tahun 2000 rancangan capaian anggaran dan program kegiatan 2015 program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan tahun 2015, pembagian anggaran antara pusat dan daerah itu kami lakukan dana disamping di pusat juga ada dekonsentrasi di 34 provinsi dan 5 Balai K3 dengan perincian bahwa total anggaran di 2000 15 setelah Pusat K3 bergabung dengan Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan sejumlah 690 milyar 473 juta 360 ribu dengan perincian yang dialokasikan ke pusat ada 6 ratus dua belas milyar 386.226 juta yang di daerah yang nanti itu yang kami masukkan untuk penguatan operasional itu sebesar 78 milyar 807 juta, 134 ribu Program perlindungan Tenaga Kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 meliputi program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Ini yang saya sebutkan tadi untuk meningkatkan kapasitas yang tersebar di 5 direktorat yaitu untuk kegiatan peningkatan kualitas teknis pemeriksa dan penyidikan norma ketenagakerjaan sebanyak 50,068 milyar Kemudian peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak dengan target 16.000 penarikan pekerja anak sebesar 100 9 milyar, 94 2 juta Kemudian yang ketiga adalah peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 21 milyar 133 juta Kemudian peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sebesar 21 milyar, 250 4 juta Kemudian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk upah gaji, tunjangan kinerja dan segala macamnya sebesar 296 milyar 330 juta 700 41.

Kemudian peningkatan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja ini yang dari Pusat K3 sebesar 191 milyar 740 tiga juta lanjut program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan nciian jenis belanja itu terdiri dari belanja pegawai subeser 7 persen kemudian belanja barang 57 persen dari anggaran 600 milyar tadi Kemudian, belanja modal sebesar 36 milyar lanjut, program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan tahun 2015 kegiatan utama pengawas ketenagakerjaan, satu pemeriksaan norma ketenagakerjaan, penyelesaian kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan fasilitasi dan peningkatan teknis pemeriksaan dan penyidikan sosialisasi jaminan sosial tenaga kerja baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Lima, penyusunan roadmap sistem pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang harus berakhir pertengahan tahun ini pelayanan pengujian kualitas lingkungan kerja, dukungan manajemen teknis Ditjen Pengawasan lanjut Kegiatan bagi masyarakat dan dinas di daerah satu, penarikan pekerja anak.

Tadi sudah saya sebutkan, saya uraikan di depan Bapak, 16 ribu pekerja anak Sosialisasi K3 bagi UMKM pengadaan Mobil Reaksi Cepat K3 Kemudian peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan berupa Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Ini ada alokasikan 9 puluh orang, artinya 3 angkatan Diklat Spesialis bidang tertentu 90 orang atau 3 angkatan Kemudian bagi dukungan pengawasan ketenagakerjaan berupa administrasi teknis kita didik 60 orang atau 2 angkatan Kemudian pejabat struktural yang notabena saat ini transaksi perubahan pejabat di bidang pengawasan ketenagakerjaan struktural khususnya di Kabupaten kota itu begitu tinggi sehingga perlu kita kenalkan dengan hal-hal tugas fungsi pengawasan ketenagakerjaan Kelima, pengadaan sarana prasana pengawas ketenagakerjaan pengadaan alat uji K3 ini sarana kerja juga. Penerapan Budaya K3 bagi Nelayan yang kami sebutkan tadi yang langsung menyentuh masyarakat peningkatan kapasitas laboratorium 4 UPTP milik Pusat K3 dan 14 UPTD provinsi peningkatan SDM penguji baik di pusat maupun di daerah Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistim pengawasan ketenagakerjaan tahun 2015 selanjutnya masih dihadapkan pada kendala yang dihadapi terkait dengan kebijakan yang diterbitkan akhir-akhir ini berupa satu pemotongan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 77 milyar 342 juta 323.000 Ini nanti kita alihkan kepada usaha-usaha yang jelas capaiannya yang langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat.

Yang kedua, kegiatan pemasaran kerja memerlukan dukungan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat melihat nanti pelaksanaannya adalah di provinsi dan mengingat kondisi geografis khususnya di daerah-daerah Timur antara satu kota dan lain dan antar pulau begitu memakan biaya yang cukup tinggi Kemudian,

tiga, berpengaruh pada target pencapaian sasaran antara lain kalau pemotongan perjalanan dinas tadi itu terhadap target 16.000 penarikan pekerja anak pemeriksaan perusahaan di Kabupaten kota dan penyusunan road map Terakhir, saya rasa inilah figur dari Direktorat Jenderal Pengawasan yang akan datang, di mana Pusat K3 sudah bergabung terintegrasi dengan Direktorat Jenderal yang tadinya berada di jajaran Sekretariat Jenderal sekarang berada di Unit Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan Demikian.

Terima kasih pimpinan.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dirjen.

#### **Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.**

3 unit Eselon I telah menyampaikan penjelasan terkait dengan program yang akan di laksanakan pada tahun 2000 15 Satu hal yang perlu kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Barenbang tadi itu sebenarnya tidak menggambarkan program sama sekali tidak menjelaskan apa yang dilakukan atau program apa yang dilakukan hanya menjelaskan unit mana menggunakan berapa Ini menjadi sulit bagi komisi untuk mengetahui apa isi program dari Barenbang Kalau Dirjen PHI terlihat programnya ada, target ouputnya.

Demikian pula Dirjen PPK juga menjelaskan apa programnya dan apa output yang di diharapkan dan berapa anggarannya Ini berbeda dengan Barenbang, tapi nanti terserah kawan-kawan Bagaimana memberikan respon terhadap penjelasan dari Barenbang tersebut.

#### **Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.**

Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu pendalaman dari anggota komisi terkait dengan penjelasan-penjelasan tadi Pertama kami mulai dari sayap kiri Yang Terhormat Bapak Ketut Sustiawan kami silahkan.

#### **F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN):**

Terima kasih pimpinan.

#### **Pimpinan dan anggota komisi 9 yang saya hormati, Pak Dirjen PHI, Dirjen PPK dan Balitfo serta jajarannya yang saya hormati.**

Pimpinan yang pertama ingin saya sampaikan bahwa betul yang disampaikan pimpinan hari ini kita sudah 2 sessi melakukan acara ini untuk pendalaman yang saya tangkap adalah bahwa seyogyanya kita membahas hari ini adalah APBN-P perubahan namun saya mendengar, menyimak dari 3 dirjen hari ini juga tidak menggambarkan berapa sesungguhnya anggaran APBN-nya APBNP jadi berapa? Ada perubahan apa tidak? Jadi kita tidak mendengar itu yang pertama termasuk di

dalamnya dari Barenbang tadi misalnya ada perubahan satker kalau ada pengalihan anggaran dari satker satu ke satker yang lain ini dimana? Sehingga saya ingin melalui pimpinan supaya ada kejelasan apa yang mau disampaikan pada forum kali ini gitu, Jadi masih ada beberapa satker atau unit kerja dirjen yang akan kita dengarkan nanti paling tidak kita mendapat gambaran mengenai perubahan anggarannya.

Yang kedua, kalau kita bicara anggaran jenis belanjanya juga kita tidak dapat berapa anggaran belanja pegawainya berapa belanja modal berapa belanja barang kita ngga dapat juga belum lagi kalau melihat anggaran berdasarkan fungsi kegiatan juga ngga dapat hingga tadi apa yang disampaikan pimpinan melalui pimpinan, mohon ke depannya ini juga bisa lebih baik terutama bahan ini jangan begitu kita rapat baru dikasih gitu Jadi, kita ini baru sekilas gitu Kita ingin melakukan pendalaman tapi kalau ada teman-teman tadi ya mungkin kita semua juga akan merasa kesulitan mengikuti ini Walaupun begitu, saya ingin mencoba satu-satu Pak pimpinan, apa yang telah disampaikan tadi saya apresiasi pada ketiga Dirjen ini dan saya coba untuk melihat tadi secara umum seperti itu. Secara umum bahwa kita belum mendapat gambaran perubahan-perubahannya.

Nah, sebelum membahas APBNP ini karena tadi juga didahului oleh evaluasi 2014, saya kira saya juga perlu mengulas sedikit untuk evaluasi saja dan kemudian APBNP ini mau kita bawa ke mana ini? 2015 nya sesungguhnya kalau saja ini lebih detil kita mungkin tidak bertele-tele, kita membahasnya perubahannya saja kalau mungkin tapi karena ini perubahan mungkin saja yang 2015 yang kemarin sudah dibahas kita bisa realokasi. Saya kira itu semangatnya seperti itu.

Nah pertama pada Dirjen PHI tadi saya ingin mendapat penjelasan juga bahwa, yang pertama evaluasi soal 2014 dari ke Dirjen PHI, PPK sama, bahwa keterlambatan penyerapan anggaran yang kecil ini hampir nyatakan bahwa ini adalah terlambatnya pencairan pemblokiran dari menteri keuangan kemudian efisiensi. Saya kira itu yang disampaikan, cuman saya tidak tahu dimana pemblokirannya itu. Jadi, jangan-jangan ke depan begitu lagi, kalau penyerapannya kurang pemblokiran lagi.

Jadi saya kira karena saya baru di komisi 9, jadi ingin juga mendapat gambaran kira-kira ada nggak program 2015 juga yang terkait seperti ini Nah terkait 2014 tadi di dirjen PHI ini Saya kira permasalahan cukup banyak tapi ada target-target yang mencapai kalau dari target realisasinya bukan keuangannya tapi, realisasi fisik mungkin ini banyak yang di atas 100 persen Nah kalau ada target realisasi fisiknya lebih dari 100 persen ini anggarannya dari mana kerja sosialkah gitu? Atau dibebankan pada perusahaan Saya kira ini perlu untuk dijelaskan Kemudian menarik salah satu hal kalau secara rincian, saya tidak mendapat ini mohon melalui meja pimpinan melalui pimpinan bahwa kita ingin membahas rancangan Undang-Undang APBNP ini kejelasan per kegiatannya juga perlu gitu sehingga kita tahu ada program A, anggarannya berapa? Global Terus kegiatannya diuraikan, tapi kita tidak tahu berapa anggaran masing-masing kegiatan ini Nah, ada tadi disampaikan bahwa ingin ada di kegiatan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industri cukup panjang nama kegiatannya yang dimaksudkan salah satunya agar buruh di dalam melakukan kegiatan atau beracara di PHI ini bisa paham Ya kalau sosialisnya tidak dilakukan, bagaimana bisa paham.

Jadi sosialisasi yang perlu dilakukan ini agar paham Jadi jangan hanya paham beracara di persidangan tapi hendaknya paham terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan ini. Itu yang paling penting saya kira, sehingga perlu ada apakah di

dalam kegiatan ini juga sudah termasuk itu sosialisasi keterkaitan ini, supaya jangan hanya paham waktu beracara tapi juga paham terhadap aturan-aturan yang tadi juga banyak disinggung ini hal juga dirasakan belum cukup dirasakan belum cukup Nah kemudian yang kedua, alokasi anggaran Dekon 34 provinsi, 33 provinsi mendapatkan anggaran ini tapi tidak tahu ini kriterianya untuk memberikan alokasi apakah berdasarkan prestasi, berdasarkan kebutuhan ataupun kegiatannya apa, karena dari serapan, dari realisasi anggaran juga tidak mencerminkan itu jumlah industri yang besar jumlah penduduk yang besar juga tidak tergambar.

Jadi artinya ini perlu ada kejelasan soal dana dekonsentrasi ini yang anggarannya juga cukup besar. Itu yang di Dirjen PHI Kemudian dari Barenbang ini ini memang kalau saya melihat yang dulunya Balitfo nanti jadi Barenbang Tadi hanya mendengar saja mohon dukungan untuk pusat pengembangan sistem informasi Nah, jadi saya kira anggaran mana yang digeser? Anggaran mana yang digeser sehingga pusat pengembangan sistem informatika ini bisa mendapatkan 22 milyar Jadi kalau 2015 nya ada pergeseran anggaran di satker mana? Pergeseran anggaran ini kemudian kegiatan apa, program apa yang digeser anggarannya gitu sehingga kita juga menjadi jelas tahun 2015 sudah dilakukukan pembahasan sekarang ada pergeseran dengan pemisahan beberapa bidang ini yang masuk kementerian Desa PDT dan PBB dan asli jelas dihina ini segenap perlu diderita ini penjelasan lebih detil sehingga anggaran 76,9 mil milyar ini menjadi jelas tidak hanya sekedar gambaran global ini.

Kalau seperti ini rasanya saya belum bisa memahami dan tidak akan, tidak bisa berpendapat setuju atau tidak dengan anggaran ini, itu yang penting Dan terakhir untuk PPK, mohon dijelaskan soal anggaran ini juga yang terkait dengan adanya penarikan pekerja anak Penarikan pekerja anak ini sesungguhnya data yang dimiliki ini berapa besar, 2014 ada 15 ribu Kemudian 2016 direncanakan juga 16 ribu pekerja anak Nah ini membutuhkan anggaran berapa ini. Membutuhkan anggaran berapa kalau totalnya sudah di disampaikan, ini ada program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan Jadi saya kira ditambah lagi kalau di sini adalah peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.

Jadi mohon bisa lebih detil dengan anggaran yang cukup besar saya kira, 109 milyar Dan yang kedua adalah ini saya apresiasi, saya mendukung kegiatan ini sosialisasi K3 bagi UMKM. Tadi juga sudah disebut bagi Nelayan, mungkin kalau bicara sektor, ya sektor lain juga saya kira membutuhkan ini, sosialisasi K3 bagi pekerja. Jadi tenaga kerja, jadi saya kira 5000 UMKM ini apakah dirasakan sudah cukup? Seluruh Indonesia begitu, karena saya tidak dari tadi tidak mendengar apakah ada pengajuan tambahan anggaran apa tidak Jadi hanya langsung saja pada anggaran APBN nya sebesar 600 berapa tadi, 690 milyar total Jadi saya kira hal-hal ini pimpinan ya ingin saya sampaikan dan sekali lagi mohon kiranya ini bisa diberikan lebih rinci kalau hari ini sore ini tidak bisa secara lisan, saya kira kita perlu mendapatkan data yang lebih rinci, terkait kegiatan-kegiatan ini, terkait anggaran saya kira apakah perubahan anggarannya ini tidak adanya tambahan tapi mungkin ada pergeseran anggaran. Saya kira ini ini perlu juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Saya demikian pimpinan terima kasih.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya Yang terhormat ibu Okky Asokawati.

**F-PPP (Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si):**

Terima kasih pimpinan Pimpinan dan Komisi 9 yang saya hormati.

**Bapak Dirjen PHI dan Jamsos,  
Bapak Dirjen Balitfo,  
Bapak Dirjen PPK dari Kemenaker yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Ya kalau tadi pimpinan mengatakan bahwa laporan dari ketiga Bapak Dirjen ini yang paling baik. bisa dikatakan seperti itu adalah Pak Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau saya merasa Tiga-tiganya kurang baik gitu, mohon maaf pak ya. Karena yang saya amati di sini, terutama untuk Dirjen PHI dan Jamsos dulu ya kenapa mungkin kita bisa belajar dari situ supaya ya tidak jadi lagi untuk tahun 2015 ini kemudian masih di tahun 2014 laporannya ini, DKI Jakarta untuk Dekonnya ini Ya, untuk anggaran Dekon tahun 2014 DKI Jakarta itu penyerapannya cuma 67,92% itu kecil menurut saya kalau dibandingkan dengan yang lain. Apakah ini artinya pak Dirjen tadi yang pak Dirjen sudah jelaskan di daerah sudah terselesaikan dengan baik, sehingga di DKI penyerapannya hanya 67,92% atau memang ada kendala di DKI sehingga tidak bisa menyerap dengan baik. Saya mohon penjelasannya.

Kemudian yang masih di tahun 2014 capaian program dan kegiatan tahun 2014 saya mengapresiasi bahwa ini capaiannya bisa lebih dari 100 persen, ya tapi ya seperti yang pak Ketut katakan tadi itu lalu anggarannya bagaimana kalau misalnya melebihi pencapaian itu sampai 100 persen Lalu masuk ke tahun 2015 saya lihat disini pak Dirjen, kok tidak ada mata anggarannya ya misalnya poin a kegiatannya pengelolaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial anggarannya 85 milyar, sasarannya ada indikatornya ada, targetnya ada tapi anggarannya ngga ada Kenapa kami perlu tahu anggarannya, karena ketika kami sudah tahu anggarannya kami bisa melihat bahwa yang menjadi prioritas bapak itu tentu adalah anggaran yang paling besar begitu, tapi kan disini kita tidak bisa melihat anggarannya itu berapa untuk setiap target ini.

Jadi ya bagaimana kami bisa mengawal salah satu tugas kami yaitu pengawalan mana yang menjadi prioritas bagi program-program bapak, ini semua ngga ada untuk mata anggarannya kemudian seperti misalnya ini jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman HI itu targetnya di tahun 2015 ini 10.500 orang Lha itu dimana, orang-orang yang dimana? Kemudian sosialisasinya dimana begitu, dan ada lagi jumlah organisasi pekerja atau buruh yang diberdayakan dan difungsikan 100 organisasi. Sekali lagi dimana saja kab/kotanya begitu. Ini lagi jumlah pengurus organisasi pengusaha yang diberdayakan 500 orang pengusaha tipe saja yang mau di, jadi pak kalau saya baca ini, ini gimana kami bisa mengawalnya karena tidak ada gitu secara detil kab/kotanya dimana dan lain sebagainya, karena kalau misalnya ini jelas tentu ya Komisi IX dalam hal ini juga perlu tahu atau mungkin juga bisa melakukan sosialisasi bersama-sama terkait dengan program-program Bapak lalu

kegiatan yang jumlahnya 51 milyar lebih yaitu konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI ini kan artinya ada pencegahan dan ada penyelesaian, artinya ada preventif dan ada kuratif.

Nah untuk preventif itu rencananya konsolidasinya targetnya 1950 orang. Pertanyaan saya dari mana ini angka dapat tiba-tiba 1950 orang, berdasarkan apa angka ini di dapat? Lalu kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ada 770 orang. Pertanyaan saya apakah masalah *outsourcing* BUMN juga di sini begitu. Nah jadi lalu lagi, saya sampai *speechless* ngga ngerti mau ngomong dari mana, rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI 85%. Ini 85% dari mana gitu, anggarannyakah atau apanya Kemudian pengelolaan persyaratan kerja kesejahteraan dan analisa diskriminasi.

Nah ini saya tertarik sekali dengan masalah diskriminasi sebetulnya tapi saya tidak mendapatkan deskripsi lebih lanjut secara verbal tadi bapak juga tidak sampaikan yang dimaksudkan dengan non diskriminasi itu apa dan bagaimana programnya. Apalagi disini ada pemberdayaan pelaku HI dalam peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh. Ini menarik sekali sebetulnya ketika kami diberikan informasi lebih jauh terkait dengan peningkatan kesejahteraan pekerja ini, karena ketika kami tahu jumlahnya ada 4.100 orang itu di mana saja yang hendak di tingkatkan kesejahteraannya Lalu bapak tadi katakan saya dengar mengenai anggaran ke luar negeri kalau tadi tidak salah ada jumlahnya disini kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yaitu 122 milyar. Pertanyaan saya tapi tidak ada disini pak di sasaran, indikator atau target dalam nomenklatur untuk anggaran ke luar negerinya.

Nah itu saya mohon penjelasan itu itu mungkin untuk Pak Dirjen PHI Kemudian untuk Balitfo saya lihat anggaran Barenbang berdasarkan satuan kerja tahun 2015. Tadi pak pimpinan sudah katakan tidak ada program-programnya, padahal tadi ketika kami melakukan rapat dengan pak Sekjen dan kami semua di Komisi IX menyetujui yaitu adanya pengembangan sistem informatika, disini masuk di dalam Balitfo di point yang kelima, Pusat pengembangan sistem Informatika sebesar 22 milyar 982 juta 718 ribu dengan 3 output Nah itu 3 outputnya kita naik setingkat ia tinggal tetapi itu Pak karena tadi kan *is most 7* bahwa memang perlu adanya pusat pengembangan sistem Informatika ini ya air di he api 3 oh Put De kita tidak tahu ini apa ini jumlahnya situ dan untuk pusat perencanaan ketenagakerjaan Barenbang, poin yang kedua satuan kerjanya itu 8 milyar sekian itu bagaimana perencanaan ketenagakerjaan kemudian outputnya itu 4 output. 4 output itu apa itu 4 output dan perencanaan ketenagakerjaan ini lalu bagaimana kaitannya nanti dengan MEA, itu kan kami juga perlu tahu, gitu ya.

Dan yang terakhir untuk Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan kalau tadi Bapak katakan bahwa sampai tahun 2019 bapak membuat *roadmap* begitu, saya menunggu *roadmap* itu pak, dimana negara kita masih membutuhkan adalah 2483 orang Kalau saya hitung pak Dirjen, sekarang 2015 ke 2019 artinya 4 tahun. Artinya setahun kita perlu merekrut jumlahnya 621 orang tenaga pengawas. Sementara dari catatan bapak terakhir disini untuk tahun 2015 bapak hanya akan merekrut 90 orang sementara *roadmap*nya 2019 per tahunnya 621 orang gitu *Speechless* saya, ngga ngerti mau bicara apa, tolong bapak terangkan saja Kemudian terkait dengan pekerja asing ini mungkin juga karena kurangnya tenaga pengawas.

Saya mau lihat dengan *scope* yang lebih kecil saja yaitu para model misalnya Kalau saya lihat sekarang saya amati banyak sekali panggung peragaan maupun majalah-majalah yang memakai model-model asing dan saya ingin tahu bagaimana

dengan izin kerja mereka karena saya tidak pernah lihat ada tenaga pengawas dari Kementerian Tenaga Kerja yang datang ke suatu peragaan busana, ngecek ke kanya atau ke agency karena jujur banyak model-model kita yang sebetulnya secara kompetensi secara fisik tidak kalah. Jadi saya minta, ini scope yang lebih kecil mungkin di scope lain ada, insinyur atau manajer.

Jadi saya harap yang kasat mata dilihat di majalah misalnya di peragaan busana itu betul-betul tolong diperhatikan pak karena apalagi nanti MEA masuk. Aduh sedih sekali nanti tenaga kerja kita Dan mengenai tahun anggaran 2014, kegiatan utama yang tidak dapat dilaksanakan sosialisasi K3 bagi nela yang penjelasannya pemotongan sehingga DIPA-nya terbitnya terlambat sehingga kurang waktu lelang Ini saya ngga ngerti pak sistemnya. Ketika melakukan sosialisasi K3 kok pakai lelang ya? Memang siapa yang melakukannya begitu.

Saya mohon penjelasan saja begitu ya, apa yang dilelang itu. Karena saya ngga faham mungkin saya mohon informasi biar saya tambah ngerti gitu. Ketika melakukan sosialisasi apakah ada pelelangan apa yang dilelang gitu kalau sosialisasi itu Dan yang terakhir, untuk program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 disitu kodenya 0260809 program perlindungan tenaga kerja pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan itu kegiatannya adalah 6. Enam kegiatan Tadi bapak jelaskan pusat adalah sistem untuk pengawasan tenaga kerja ini, sementara daerah adalah penyelenggaranya.

Nah pertanyaan saya di dalam kode 0260809 ini ada 6 kegiatan, sistem apa yang akan dibangun dengan 6 kegiatan ini, sementara penyelenggaraannya kan daerah, gitu ya Kemudian saya juga tertarik dengan kode 2198, perlindungan pekerja perempuan, penghapusan pekerjaan anak, itu ada 7 output, saya ingin tahu outputnya itu apa saja, begitu dan kalau toh tadi juga dikatakan mau akan ada penarikan pekerjaan anak, saya ingin tahu juga itu di daerah mana saja? Lalu di sini juga ada pengadaan mobil URC K3 30 unit pertanyaan saya itu masuknya di kode yang mana, disini ngga ada ini pengadaan mobil 30 unit K3. Apa itu masuk kode yang dalam kode yang 2164, begitu Dan ketika berbicara mengenai penerapan budaya K3 bagi nelayan 8350 unit, ini berupa apa sih, unitnya berupa apa? Bagaimana? Oh ya penerapan budaya K3 bagi nelayan itu sebanyak 8350 unit itu berupa apa penerapannya itu?

Itu saja, terima kasih pimpinan.

*Bilahittaufikwalhidayah,*

*Wassalamualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

#### **ANGGOTA KOMISI IX:**

Sedikit interupsi. Baik terima kasih pimpinan.

Pertama bahwa tadi saya menangkap dua pandangan dari pak Gusti dan ibu Okky. Prinsipnya adalah sesungguhnya kita belum paham betul ini Sesuai dengan



apa yang menjadi kesimpulan kita pada saat Rapat Kerja bersama dengan Menteri. Nah, tadi pada saat rapat bersama dengan Sekjen dan irjen itu kan sudah ada kesimpulan di poin nomor 7 itu jelas Jadi komisi IX ini meminta untuk ada rincian masing-masing rancangan program dan kegiatan agar kita jelas mengetahui mana-mana bagan, bagian dan postur anggaran yang kita sepakati tadi betul, pak sampaikan soal bagaimana posisi perubahannya penambahannya di mana dan tadi juga ditambahkan ke ibu Okky bahwa Ini banyak hal yang tidak sesuatu yang tidak kita ketahui di mana wujud yang kita akan sepakati ini sangat sulit ketika kita menyetujui postur anggaran yang kita tidak tahu wujudnya dimana. Nah, ini kayak jelangkung kita jadinya pimpinan Nah, agak susah ini kita.

Nah, jadi kita butuh rincian, tentu kita menghargai apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak Dirjen kita, tentunya dengan harapan tentu ini lebih spesifik untuk kita membahasnya itu yang bisa kami sampaikan agar menjadi perhatian bersama kita anggota, karena saya yakin akan seirama semua, kita juga bingung ini, Ibu Okky agak bingung apalagi kita ini Kan begitu, karena biasanya bu Okky paling teliti ini Begitu bu ya? Baik.

#### **ANGGOTA KOMISI IX:**

Interupsi pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Silahkan.

#### **F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):**

Mungkin juga sama, menguatkan. Saya dari Fraksi PDI Perjuangan menguatkan apa yang disampaikan oleh anggota sebelumnya. Saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar lagi, tadi sudah begitu rinci disampaikan oleh ibu Okky dan pak Gusti ya. Jadi, menurut saya kesimpulannya sama dengan (saya belum ganti nama lho) (Rieke) Oh Ketut Gusti ya Bukan Gusti Allah.

Jadi, menurut saya tadi juga Ketua Komisi mengatakan akan ada pendalaman minggu depan, dan saya tidak bisa membahas anggaran begitu cepat dengan bahan yang baru saya terima. Dengan demikian saya usulkan rapat ini kalau boleh ya tidak terlalu panjang, langsung pada kesimpulan, karena tadi sudah lengkap oleh ibu Gusti, ibu Okky disampaikan say kira jadi kita meminta ada rencana program yang lebih rinci lagi outputnya sama seperti ibu Okky tadi, outputnya apa, indikatornya apa, targetnya apa, itu disampaikan dengan lebih baik.

Itu saja pimpinan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Saya kira, terima kasih, interupsi Ini sudah terlanjur terdaftar beberapa penanya, kalau semuanya sependapat seperti itu berarti segera kita selesaikan.

Selanjutnya saya persilakan, yang terhormat pak Handayani sama, oke. Kemudian almukarom M. Ali Thahir.

### **ANGGOTA KOMISI IX:**

Saya sepakat dengan beberapa catatan Pertama, dari maksud dan tujuan global sisi anggaran tahun 2015 ini memang nampak tetapi dari sisi rinciannya itu memang perlu dilengkapi target-target khusus tidak boleh misalnya angka global sekian milyar kemudian sekian orang tadi itu.

Jadi saya kira secara umum sudah okelah pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi saya kira kaidah-kaidah keuangan ini belum nampak di dalam *paper-paper* ini pak. Jadi saya kira memperkuat Ibu Diah Pita Pita, Pitaloka Ibu Ibu Oneng Kemudian Ibu pragawati, Okky Asoka wati, Pak Ketut semuanya sudah bagus ya, tinggal persoalan dipertajam Memang disini masih buram sekali meskipun saya meskipun sarjana hukum, tapi pernah belajar akuntansi, pernah ikut kursus-kursus begitu, saya juga susah menangkapnya itu terlalu parsial, terlalu remang-remang kemudian tidak kelihatan apa aspek-aspek tujuan khusus di dalam penganggaran itu sehingga susah untuk mengantisipasi bagaimana kalau itu persoalan teknis dilapangan.

Saya kira ini saja, tambahan dari saya. Jadi perkuatlah norma-norma keuangan itu. Kemudian lama gak ada kendala kedua ada kendala konstitusional yaitu MK mengatakan bahwa DPR memang tidak memberikan apa namanya satuan 3 tidak diberikan, tetapi kita boleh membedah program Jadi memang angkanya tidak Kalau, jadi kita boleh membedah program, meskipun secara substansi di dalam program itu sudah ada angka-angka. Jadi kita mungkin MK dulu itu mungkin orang SH semua, sehingga nggak ngerti keuangan. Nggak tahu kan teman-teman saya juga di MK itu Jadi saya kira masak Anggota DPR tugasnya itu legislasi penganggaran dan pengawasan. Anggaran sendiri dibatasi, kan lucu juga itu MK itu Ya, jadi ya susahlah.

Jadi oleh karena itu kita kembali pada norma-norma keuangan, tetapi bagi teman-teman Dirjen sudah karya kerjanya juga sudah bagus meskipun saya lihat ada beberapa paper, saya tidak perlu sebut enggak enaklah ya. Ini memang ada yang tergesa-gesa saya lihat ini Ada forto copy juga terbalik-balik, itu juga saya saya paham tetapi saya tidak perlu ngomonglah, karena kita ini equal dalam pengertian kebersamaan yang kita mau cari, jadi bukan kesalahan.

Oleh karena itu pertajam sekali pertajam, pertajam dengan pendekatan norma, kemudian satuan kegiatannya itu butuh putusan pk jangan takut Pak di sampaikan saja meskipun DPR tidak semua membaca kecuali ahlinya Jadi serahkan saja nanti kita lihat pak Ketua ya programnya disampaikan termasuk rupiahnya satu-satu. Terima kasih, bu Oneng, Astagfirullahaladziim Bu Diah, mempertajamnya ya.

Jadi pak Ketua saya mendukung teman-teman yang semuanya itu sehingga saya tadi juga begitu mau ngomong, apa ya mau saya ngomong, padahal saya sudah sap-siap tetapi ya memang itulah kendala administratif kita.

Terima kasih Saudara pimpinan kita cepat bikin rumusan saja biar cepat.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Ali Selanjutnya yang terhormat..

**ANGGOTA KOMISI IX:**

Interupsi..? Ya pak, interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silahkan.

**ANGGOTA KOMISI IX:**

Baik pak Ketua, teirma kasih.

Mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya Yang kami hormati segenap Dirjen yang berhadir Dengan bahan yang kita terima bapak/ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa kalau memang kita nanti hari Senin kita akan lebih *breakdown* daripada apa yang kami terima, tentu ini juga disampaikan kepada beberapa Dirjen yang belum menyerahkan bahan itu agar bahannya tidak seperti ini Itu bahannya breakdownnya sampai rupiahnya, apa kegiatannya. Ini kan kelihatannya apa yang dituliskan disini bapak-bapak sekalian kan induk-induknya saja, anak-anaknya kan tidak kelihatan ini Jadi kita kalau perlu sampai cucunya ya kelihatan yah film demikian sekilas ya tidak dan beliau tertekan jual kucing dalam karung tidak begitu berhasil *lock* Ya, kalau yang disini itu mungkin beda-beda tipis dengan apa yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya Maka kita ingin sekali lagi pak Ketua, induk sampai cucunya kita mau lihat.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih.

Selanjutnya Ibu Amelia.

**F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI):**

Terima kasih pimpinan.

Pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, sebagian besar telah disampaikan oleh rekan ibu Okky Asokawati.

Saya mohon kepada bapak Dirjen dan jajarannya untuk kemudian pada paparan pendalaman nanti lebih jelas memberikan target output dan *roadmap*-nya kepada kami sehingga kita bisa menuntaskan APBNP ini secepatnya.

Demikian pak pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Ibu Irma.

**F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE):**

Sama, saya sepakat juga dengan semuanya, hanya ingin titip saja ini ke pak Simbolon Pak Dirjen Saya ngga melihat anggaran penguatan untuk mediator kita pak di PHI Pak Itu saya tidak lihat, padahal itu penting sekali pak. Ada sekitar masih sekitar 2.000 lebih pak, 2.353 mediator kita kekurangan pak, di seluruh Indonesia Tolong itu saya titip, besok hari Senin itu harus ada anggarannya Pak.

Kemudian juga anggaran terkait masalah sosialisasi syarat-syarat pengajuan penyelesaian perselisihan, saya juga nggak lihat. Padahal itu yang menjadi momok bagi semua buruh ketika dia mengajukan kasusnya ke PHI Nah itu juga tidak ada anggarannya saya lihat disini Nah ini dikemanain ini anggaran Ya kan, dimana masuknya karena nggak terlihat. Jadi besok harus ada anggaran itu pak ya. Karena dengan tidak adanya anggaran itu, bagaimana bapak bisa membantu buruh-buruh untuk menyelesaikan hubungan industrial mereka di PHI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada lagi? Semuanya hampir samalah ya, beda-beda tipislah.

**ANGGOTA KOMISI IX:**

Nambah pimpinan dikit.

**KETUA RAPAT:**

Ya ya silahkan.

**ANGGOTA KOMISI IX:**

Terima kasih pimpinan.

Saya tambahkan memperkuat dari apa yang disampaikan teman-teman tadi untuk bahan hari Senin rupanya sudah nyampe ke kita masing-masing yah, tetapi isinya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kalau untuk hari Senin bisa kita bekerja dengan lebih baik lagi, kira-kira kapan bahan ini kami terima, tidak mungkin hari Senin kemudian kita bahas langsung, kapan kita harus pelajari itu. Mungkin sebelum hari Senin harus kita sudah terima itu Pimpinan, dan kalau dulu pernah terjadi itu

kita bisa kita mendapatkan bahan itu di rumahnya masing-masing, diantarkan ke rumahnya masing-masing.

Mungkin itu pimpinan cukup.

#### **KETUA RAPAT:**

Oke, kami persilakan kepada pemerintah. Mulai dari Dirjen PHI untuk memberikan respon.

#### **DIRJEN PHI:**

Terima kasih Pak pimpinan yang kami hormati.

Ini dari yang pertama dulu mungkin dari pak Ketut. Terima kasih pak Ketut banyak hal yang bisa menjadi perhatian kami di dalam rangka penguatan hubungan industrial Tadi mengenai perincian anggaran Per program dan per kegiatan kami akan sampaikan nanti Kemudian mengenai keterlambatan pencarian blokir yang tadi kami sampaikan memang dirasakan itu menjadi salah satu yang menyebabkan serapan kita tidak bisa mendekati 100 persen ini antara lain misalnya adanya atensi dari BPK dan KPK terkait dengan pemberian subsidi program atau Bansos itu dihentikan di 2014 sehingga kita juga mempengaruhi itu.

Kemudian yang kedua juga adanya perubahan-perubahan dalam rangka kebijakan pemerintah sehingga membuat keterlambatan di dalam pelaksanaan program-program yang sudah kami persiapkan sebelumnya Kemudian yang berikut pak Ketut mengenai target-target capaian yang melebihi 100 persen, ini memang pada realitanya demikian. Jadi misalnya tadi yang penyusunan peraturan perusahaan, karena kita melakukan bimbingan teknis maupun sosialis, itu kan dari hasil pengamatan kami maupun laporan kondisi di lapangan. Kalau pesertanya misalnya ada 60 perusahaan kemudian yang 60 perusahaan karena kita minta juga menginformasikan menyampaikan kepada rekan-rekan yang belum membuat PP maupun PKB misalnya, nah ini menjadi alat kita juga memanfaatkan kehadiran mereka sehingga ada penambahan-penambahan x plus-plus dan sebagainya. Dengan demikian artinya sosialisasi yang kami lakukan itu betul-betul bermanfaat walaupun target kita tadi misalnya 2000 misalnya, ternyata dalam pelaksanaannya melebihi dari 2000.

Demikian juga mengenai kepesertaan ketika kita melakukan sosialisasi kepengurusan SP/SB Mereka ini yang penting mereka hadir dan diakui Pak. Jadi walaupun yang kami undang misalnya 1 SP itu 2 atau 3 orang, yang datang bisa lebih dari 3 orang Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama, inilah akhirnya memberikan kontribusi nilai nilai positif kepada realisasi dari target-target yang kita inginkan.

Ini 2 contoh yang kami sampaikan Pak Ketut Kemudian bagaimana kejelasan nanti kami akan lengkapi.

Kemudian kegiatan sosialisasi pemahaman beracara. Terima kasih Pak Ketut bapak dan Ibu. Ini memang suatu program yang baru yang kita inginkan karena memang dalam prakteknya teman-teman kita para pekerja boro-boro Pak mereka memahami peraturan perundangan substansi yang sekian banyak kita sendiripun kadangkala tidak tahu bagaimana mekanisme atau beracara ketika di pengadilan hubungan industrial.

Jadi kita masuk di langkah pertama dulu di pintu besarnya bagaimana teman-teman itu bisa memahami dulu melakukan beracara di pengadilan hubungan industrial, baru kedua ada juga program kita bagaimana pengetahuan-pengetahuan.

#### **INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:**

Interupsi Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya.

#### **ANGGOTA KOMISI IX:**

Ketua, interupsi ketua bagaimana kalau kita langsung saja kesimpulan Sdr. Ketua. Kita sudah dengar tadi semuanya 9 pertanyaan, semua sudah sepakat untuk langsung ke kesimpulan Jadi jawabnya nanti saja Ketua (Saya kira itu).

#### **KETUA RAPAT:**

Ya pak Robert, diambil kesimpulan itu hak pemerintah untuk memberikan respon singkat Ya, jadi itu mekanismenya seperti itu ada tanggapan dari peserta, pemerintah berkewajiban dan berhak menyampaikan respon tapi kami minta supaya lebih apa lebih focus.

#### **DIRJEN PHI:**

Silahkan Maaf kalau begitu pak Pimpinan. Kami kira tadi detik satu persatu Berarti tadi dari pak Ketut sudah bisa kami selaraskan dengan tadi ibu Okky Kemudian secara kesimpulan lagi yang bisa kami sampaikan dari substansi PHI dan Jamsos adalah tadi mengenai yang persentase bu Okky, kita memang ada keinginan penyelesaian dispute tadi, tidak dibawa ke ranah ke PHI, ke pengadilan. Inilah bagian grand design kita supaya hasilnya yang lebih baik ada kesepakatan Bipartit Ini yang lebih kita inginkan ke depan di dalam program-program hubungan industrial ketenagakerjaan. Saya pikir itu.

Tadi terkait dengan mengenai perjalanan keluar negeri, Bapak dan Ibu memang kami tidak secara rinci menyampaikan di sini, tapi masuk di dalam kegiatan ataupun di dalam program dukungan management. Itu yang kami sampaikan barangkali. Kemudian tadi dari bu Okky sementara itu.

Selanjutnya bu Irma terima kasih banyak, ini walaupun bu Irma tadi sedang ke luar, sebetulnya dalam rencana kita 2015 juga sudah memprogramkan bagaimana revitalisasi maupun peningkatan kualitas teman-teman kita yang disebut dengan mediator sebagai pelaku memberikan pemahaman dengan fungsi 3, yaitu pembinaan kemudian menyelesaikan dan memberikan membangun sistem-sistem.

Nah, ini ke depan kita ingin tidak saja mediator itu sebagai pemadam kebakaran tapi juga lebih kepada pembinaan supaya tidak terjadi perselisihan maupun PHK, unjuk rasa dan sebagainya.

Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka mediator ini sebagai jabatan fungsional yang paling utama kita juga mengalokasikan merencanakan pendidikan pelatihan kepada calon-calon mediator dengan satu angkatan 30 orang

dan tahun 2015 kita rencanakan 5 angkatan berarti 150 orang, padahal kita membutuhkan lebih kurang 2300 mediator, nanti dikurangi lagi dengan yang pensiun dan sebagainya Sebetulnya plus-plus lagi. Satu hal kami tadi menyampaikan dukungan kita bersama kami harapkan adalah membangun pengadilan hubungan industrial yang yang betul-betul adil, maka kita akan melakukan seleksi hakim adhoc di tahun ini Barangkali itu bapak dan ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan dari sisi pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Terima kasih Bapak pimpinan.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kepala Badan, kami persilahkan.

**KEPALA BADAN:**

Izin pak, singkat saja.

**Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan yang kami hormati,  
Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

Yang pertama adalah terima kasih kami atas dukungan terhadap program dan kegiatan di lingkungan Barenbang tahun 2015.

Kemudian yang kedua terkait dengan APBNP untuk 2015 itu memang sebagaimana disampaikan oleh Menteri Selasa yang lalu bahwa hanya Ditjen Binalattas dan Ditjen Binapenta yang mendapatkan anggaran tambahan, namun demikian hampir semua dari kami itu akan terjadi perubahan karena ada realokasi dan sebagainya termasuk itu juga bahwa nanti rincian dari perubahan anggaran Balitfo seperti yang tadi disampaikan pak Ketut juga kami siap untuk menjelaskan lebih lanjut termasuk penjelasan rinciannya Pak diri kami akan siap menjelaskan lebih lanjut untuk hari termasuk penjelasan rinciannya pak. Jadi kami akan siap menjelaskan lebih lanjut untuk hal-hal yang berkaitan dengan rincian.

Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas dukungan bapak/ibu sekalian.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Dirjen PPK kami persilahkan.

**DIRJEN PPK:**

Terima kasih pimpinan.

Mohon diizinkan kami untuk menyampaikan agak detil. Pak Ketut bahwa sebagaimana disampaikan Kepala Badan tadi memang, Dirjen PPK tidak mengacu, tidak ada perubahan anggaran, yang pada dasarnya bahwa untuk program 2015 itu hampir sama apa yang telah di samalah dengan disahkan oleh Anggota Dewan yang terdahulu Kemudian penjelasan anggaran penarikan pekerja anak dan data bahwa kami menjalankan program penarikan pekerja anak ini terintegrasi dengan program PPK PKH Program Keluarga Harapan tadi saya sampaikan bahwa itu di bawah TNP2K dengan menggunakan data terpadu.

Jadi keluarga sangat miskin kemudian pendekatannya adalah pendekatan kesehatan, pendekatan sosial, kemudian pendekatan edukasi dan segala macam, datanya disana Kalau menurut ada data itu dan berbagai survei yang ada di Indonesia ini sekarang ini masih ada sekitar 1,7 juta yang anak yang tidak dalam dunia pendidikan. Artinya kalau dia tidak menganggur di rumah, ya dia berada di tempat kerja, apapun pekerjaannya itu, membantu orang tua atau lain dan sebagainya.

Kemudian memang prioritas sesuai dengan konvensi ILO 182 mengenai *Worst form of child labour* Yang masuk kategori ini ada sekitar 400.000 Capaian kita hingga saat ini memang masih rendah terkait memang penyediaan anggaran yang sangat terbatas Kami juga diharuskan untuk mengambil memutuskan suatu keseimbangan pengadaan anggaran ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kami Tidak mungkin ini kita poskan di dalam satu kegiatan sementara fungsi lain akan tertinggal Dukungan untuk UMKM kalau data dari UMKM hingga saat ini ada 50 juta unit UMKM berdasarkan Undang-Undang UMKM yang ada di kita dari 200 tujuh belas ribu itu ada 70% nya kecil dan menengah Dan sekali lagi bahwa memang Satuan 3 yang kami terima memang sedemikian sehingga kami harus mempertimbangan keseimbangan tadi, termasuk untuk tambahan atau geseran-geseran.

Ini sudah kami sangat pertimbangkan Ibu Okky mengenai pemblokiran karena apa kika sama-sama tahu pada periode yang lalu untuk melakukan review persetujuan dari DPR sangat-sangat terlambat Kita faham semua itu mengenai itu sampai dengan April akhirnya proses di anggaran akhirnya sekitar Juli Kita mengalami kendala di Komisi IX Ini saya katakan, saya sampaikan secara jujur dan terbuka Nah, ini yang mempengaruhi termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan harus dengan lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah menunggu roadmap dibuat per sekarang ini ada kebutuhan 600 per bulan, per tahun, kenapa 90 Satu, kita mengalami kesulitan kandidat bahkan jujur bu bahwa roadmap ini belum selesai kita kerjakan karena Kadin masih melakukan konsultasi dengan BKN segala macam dan dimungkinkan disitu suatu cara-cara rekrutmen baru termasuk langsung ke Perguruan tinggi-perguruan tinggi, karena spesifikasi pengawas harus satu Kemudian juga kita belum selesai mengenai rekayasa sistem pengawasan Sebetulnya roadmap itu angka bisa lebih berkurang ketika sistemnya lebih efektif termasuk penarikan penyelenggaraan pengawas di provinsi.

Ini kan memerlukan suatu install ulang daripada sistem penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan TKA model, bahwa Pengawas tidak pernah datang ke peragaan atau agen-agen kami akui ini bu bahwa konsentrasi pengawas saat ini memang ada di industri khususnya manufaktur kecuali mandat-mandat konvensi



yang sudah diratifikasi seperti pekerja anak kemudian sekarang konsentrasi ke jaminan sosial Untuk impresstariat kita sudah masuk dan kita sudah mem mengembangkan kebijakan untuk impresstariat dengan sebuah perizinan bahwa kegiatan ini pada periode yang lalu kami sudah pernah melakukan permohonan deportasi minimal untuk sekitar 600-an orang yang bekerja di sektor impresstariat impraseriat seperti penyanyi karaoke dan segala macam, tapi untuk model mudah-mudahan kedepan kami mulai terbuka untuk ikut mencermati masalah ini termasuk sebetulnya pemain-pemain olahraga profesional asing ini juga harusnya mendapatkan perhatian tetapi memang kapasitas yang kami miliki belum sampai menjangkau kesana.

Mudah-mudahan nanti ke depannya kami lebih mampu ke sana Sosialisasi K3 Nelayan, kok pakai lelang segala macam lini sekaligus untuk UMKM yang sosialisasi K3 untuk UMKM bu bahwa kami memberitahukan cara-cara menyelamatkan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja apakah itu untuk nelayan atau UMKM Kalau untuk nelayan itu yang saat ini kita lakukan kita memberikan live jacked itu, pelampung untuk melakukan sosialisasi, kamu cara pakainya seperti ini jika kamu pada ombak ini bagaimana terus kamu cara berenangya bagaimana dan nanti akan kita tingkatkan menjadi pusat layanan informasi untuk membaca data awal data lawal, kemudian nanti akan kita kembangkan menjadi *rescue* terbatas gitu, bahkan nanti akan kita kembangkan sebagai tempat pelatihan sederhana gitu Barang-barang inilah yang harus diadakan bu termasuk kepada penjual gorengan di sekolah UMKM penjual bakso dan segala macam kita memberikan cara-cara yang benar pemahaman yang benar terhadap pemakaian tabung gas 3 kilogram Dalam kesempatan itu kami juga memberikan sekaligus mendorong konversi pemakaian gas, kami memberikan tabung gas 3 Kg plus regulator dan seluruhnya berdasarkan SNI dan diambil dari Dan inilah yang kita berikan kepada masyarakat langsung yang menyentuh masyarakat langsung. Ini yang menyentuh masyarakat langsung, caranya demikian. Tetapi tidak hanya sebatas itu tapi bagaimana memakai plastik ketika meramu, kemudian pemanasannya sampai seberapa. Kemudian kalau pakai pemanasan itu jarak yang diambil, kemudian bahan baku yang bisa beracun misalnya, taruh di mana dan segala macamnya itu Itu yang memerlukan waktu lelang-waktu lelang, itu pengadaannya itu 6 pengembangan sistem perempuan penarikan Kemudian mobil RSC, ini sekarang ini masih masuk di kelompok pendukung bu Kami laporkan juga bahwa saat ini kami sudah mengusulkan ke Kementerian keuangan untuk memecah DIPA yang ada di kami, dari 1 DIPA menjadi 6 DIPA nanti akan mendampingi 1 DIPA lagi yang sekarang ini sudah tersendiri dan dari Pusat K3 Nah, mungkin nanti kalau sudah di sana bisa dipilah-pilah sesuai dengan Tupoksinya itu akan kelihatan sehingga output-output Kami akan susulkan nanti mengenai output-outputnya dari setiap kegiatan itu seperti contoh untuk penerapan norma kerja anak, ada anak 4 output katakan ketaatan di dalam penempatan norma penempatan tenaga kerja asing kemudian penempatan tenaga kerja luar negeri norma pentaatan terhadap norma, ini yang pertama.

Pentaatan norma mengenai jaminan sosial pentaatan norma, sama sebenarnya tapi pembedanya yang berbeda terhadap kebebasan berserikat, pentaatan terhadap norma hubungan kerja pemakaian waktu kerja dan waktu istirahat Ini adalah suatu kegiatan-kegiatan dengan output-output tersendiri bu Tetapi nanti secara rinci kami bisa sampaikan masalah itu Pak Moha, itu Rieke dan pak Ali ya kami akan mengikuti apa yang diminta oleh anggota Dewan kami akan sangat terbuka kami adanya ini, kami berpikir berdasarkan program dan kalau ke

depan apabila bisa di dalam pelaksanaan bisa kita kolaborasikan dengan anggota Dewan itu merupakan hal yang positif bagi kami Kami memerlukan dukungan Dewan di dalam pelaksanaan karena menurut pengalaman kami aktivitas yang didukung oleh anggota Dewan menjadi strong di daerah Mengapa demikian? Kami yakin bahwa Bapak/Ibu sekalian di daerah punya jaringan itu yang justru kami manfaatkan kegiatan yang dari kami menjadi besar dan berpengaruh di masyarakat.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup ya, kita simpulkan.

#### **Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dirjen, Kepala Badan.**

Bagian terakhir dari RDP ini kita akan mengambil kesimpulan Ada 3 poin dari kesimpulan dan saya pertama, tujukan kepada internal komisi untuk meminta persetujuan atau penyempurnaan.

1. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memberikan rincian masing-masing rancangan program dan kegiatan kepada komisi IX DPR RI serta memperhatikan secara sungguh-sungguh masukan dan saran-saran anggota Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga kerja Badan Pencernaan dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan sosialisasi program peraturan perundang-undangan dan kegiatan di sektor ketenagakerjaan dengan melibatkan representasi Anggota Komisi IX DPR RI berdasarkan aspirasi daerah.
3. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan RAPBNP tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Jadi, itu 3 kesimpulan. Jadi Bapak Dirjen dan Kepala Badan Poin 3 itu sangat ditentukan implementasi dari poin 1 dan poin 2 Saya kira itu poinnya. Jadi keputusan akan diambil di depan bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerja dalam satu dua hari ke depan.

Itu kawan-kawan bapak/ibu sekalian Anggota Komisi, ada penyempurnaan?

**F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN):**

Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Ya, pak Ketut.

**F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN):**

Ya ini masalah nomenklatur saja, hari ini namanya Balitfo atau Barenbang ? Itu yang dicantumkan di keputusan rapatnya biar jelas gitu, apa nomenklatur yang mau dipakai.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Kepala Badan.

**KEPALA BADAN:**

Terima kasih pak Kami menyarankan Barenbang karena sudah ada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2015 dimana organisasi level eselon satu di Kementerian Ketenagakerjaan adalah Barenbang Gitu pak, kalau..

.....:

Jadi yang benar Badan Perencanaan dan pengembangan) ketenagakerjaan ada itu sudah melekat di nama kementriannya pak.

.....:

Oh ya oke, jadi pak Ketut sudah betul.

**KETUA RAPAT:**

Sudah betul cukup yah?

Kami silakan kepada Pak Dirjen dan Kepala Badan terhadap kesimpulan ini, bisa diterima?

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA:**

Atas nama kawan-kawan Dirjen PHI dan PPK kami menyampaikan terima kasih atas rapat pada sore hari ini dan kami menerima terhadap kesimpulan yang telah diputuskan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* kesimpulan RDP antara Komisi IX dengan Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Dirjen PHI Kepala Badan Barenbang dan juga Dirjen PPK dapat kita sahkan ya kesimpulannya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, bapak/ibu sekalian, sebelum kita akhiri Mau bicara tiga-tiganya juga sebagai *closing remark* atau cukup diwakili satu, terserah Kami persilakan siapa yang mewakili.

**KEMENTERIAN TENAGA KERJA:**

Terima kasih pimpinan.

Atas nama arekan-rekan kami menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan mudah-mudahan dengan dukungan Anggota Dewan Yang Terhormat Kami lebih dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan lebih fokus kepada kebutuhan masyarakat.

Terima kasih.

*Wassalammualaikum warohmatullohi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak Dirje.

**Bapak/Ibu sekalian.**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* RDP pada sore hari ini kami nyatakan selesai dan kita tutup.

***Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh.***

Baik bapak/ibu sekalian, pengumuman internal Komisi IX, RDP akan kita lanjutkan pada hari Senin di suatu tempat konsinyering sampai selesai Terima kasih Pimpinan ada Paripurna hari Senin Paripurnanya tidak bertentangan, sudah diatur.

**RAPAT DITUTUP PUKUL . 17:10:11 WIB**

**Jakarta, 5 Februari 2015  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Ttd,**

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE  
NIP. 196707171993031006**